

## BAB II

### Kerangka Konseptual dan Teori

#### A. Tinjauan Umum tentang Strategi Politik

Strategi berasal dari kata *strategia* yang memiliki konotasi pengertian sebagai suatu seni (*art*) dan ilmu (*science*) tentang pengendalian militer. Berdasarkan hasil surveynya, Rue dan Holland menyimpulkan bahwa pengertian strategi adalah suatu penentuan dan evaluasi berbagai alternatif cara untuk mencapai misi atau tujuan, termasuk pemilihan alternatif-alternatifnya.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, definisi strategi yang dalam Bahasa Inggris adalah *strategy*, adalah *plan indeed achieve a particular purpose* atau rencana yang diharapkan untuk meraih sebagian tujuan.<sup>22</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi adalah seperangkat aktivitas yang digunakan untuk merencanakan, menentukan dan mengevaluasikan berbagai cara untuk mencapai misi dan tujuan yang diharapkan.

Sedangkan untuk strategi politik menurut Baihaqi, strategi adalah suatu alat dan cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Strategi politik

---

<sup>21</sup>M. Irhas Effendi, *Perubahan Lingkungan dan Strategi serta Implikasinya terhadap profitabilitas dan Risiko Bank Umum Devisa di Indonesia*, (Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2001), 23

<sup>22</sup>*Oxford Learner's Pocket Dictionary*, English: Oxford Dictionary Press, 2003, 427

kemudian diartikan sebagai alat politik untuk mendapatkan sesuatu. Baik itu mendapatkan kemenangan, jabatan, dan kekuasaan.<sup>23</sup>

Dalam sebuah strategi tersimpan tujuan khusus, salah satunya adalah “kemenangan”. Sehingga untuk mencapai kemenangan tersebut dibutuhkan suatu metode perencanaan strategi. Dalam buku Peter Schroder<sup>24</sup> dijelaskan, bahwa terdapat empat perencanaan strategi, yaitu, i) pendekatan metodologis: kemiliteran, berorientasi pasar, politis, ii) model kemiliteran, iii) model perencanaan korporasi, dan iv) model perencanaan korporatis.

#### 1) Pendekatan metodologis: kemiliteran, berorientasi pasar, politis.

Dalam pendekatan ini terdapat gambaran yang memiliki makna masing-masing ada perbedaan dan persamaan. Pendekatan tersebut saling berpotongan tidak hanya karena dalam persamaan metodologinya, tetapi juga karena beberapa menjadi bagian dari strategi lainnya. Dengan demikian strategi militer dapat selalu menjadi bagian dari strategi politis, dan sebuah strategi politis juga selalu merupakan strategi pasar, atau setidaknya menunjukkan adanya orientasi pasar, yang perlu kita lihat pada saat kampanye pemilu.

#### 2) Model Kemiliteran

Untuk lebih menghargai penerapan strategi militer atas strategi lainnya, seseorang perlu memiliki beberapa pengetahuan dasar mengenai konsep dan prinsip perang. Menurut Wylie, tujuan awal seorang perencana strategi dalam

---

<sup>23</sup>Bapak Baihaqi, Wawancara (19 Juni 2013)

<sup>24</sup>Peter Schroder, *Strategi Politik (Politische Strategien)* Edisi Revisi, (Jerman: Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit, 2008), 11-19

perang adalah memiliki kontrol atas musuhnya. Kontrol ini terjadi melalui suatu pola perang yang dimanipulasi dengan cara agar titik berat perang tersebut bergerak ke arah yang menguntungkan si perencana strategi dan merugikan musuh.

Titik berat perang menentukan hasil perang tersebut. Oleh karena itu, tujuan utama strategi adalah memindahkan titik berat perang bagi keuntungan pihak sendiri. Hal ini tergantung pada beberapa faktor: hakekat perang, tempat dan waktu perang, serta bobot titik berat.<sup>25</sup>

### 3) Model Perencanaan Korporasi

Perencanaan korporasi merupakan analisa sistematis dan perumusan tujuan yang mengarah ke depan, yang mencakup cara dan pilihan-pilihan bersikap, pilihan optimal yang dimiliki dan penetapan instruksi-instruksi untuk merealisasikannya secara rasional.

### 4) Model Perencanaan Politis

Dalam proses perencanaan politis terdapat pola yang diutamakan yaitu:

Perencanaan strategi melakukan upaya untuk memposisikan organisasi berdasarkan realita lingkungan operasionalnya. Ada dua jenis lingkungan: i)

---

<sup>25</sup>Titik berat di sini merupakan titik kritis yang menentukan hasil akhir suatu pertempuran. Untuk memindahkan titik berat pertempuran demi keuntungan sendiri, Wylie mengusulkan dua pola strategi yaitu pola sekuensial (bertahap) dan pola kumulatif (kumpulan). Dalam pola sekuensial, proses perang diibaratkan seperti sebuah rantai. Setiap bagian merupakan aksi yang terpisah yang tumbuh secara alami yang berlandaskan pada apa yang dicapai pada aksi yang sebelumnya. Pola kumulatif memandang perang sebagai kumpulan aksi-aksi kecil yang tidak saling tergantung secara sekuensial.

lingkungan eksternal yang merupakan wilayah dimana kekuatan atau faktor lain mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi tersebut. ii) lingkungan internal, yang terdiri atas sumberdaya-sumberdaya, kekuatan, peluang, serta tuntutan dari dalam organisasi itu sendiri. Perencanaan strategi harus mampu mengenali dan menilai peluang dan ancaman yang terjadi di lingkungan eksternal yang berhubungan dengan visi, serta tujuan akhir organisasi.

a. Metode perencanaan konseptual

Dalam metode ini diperlukan dan fleksibilitas dalam perencanaan strategi. Metode ini menjamin bahwa perubahan atas strategi yang telah direncanakan hanya dilakukan apabila batas nilai *threshold* terlewati, sehingga terjadi ketenangan, dan menghindari reaksi yang tergesa-gesa dan terlalu emosional. Perencanaan konseptual memandang faktor lingkungan sebagai variabel, karena tujuan utama strategi politik adalah untuk mengubah lingkungan, masyarakat dan kerangka hukum.

Untuk dapat menetapkan pilihan yang tepat, kita harus memiliki kemampuan untuk mengenali pola dasar strategi yang diperlukan. Ada beberapa jenis-jenis strategi:

**1) Strategi Ofensif**

Strategi ofensif selalu diperlukan jika partai ingin meningkatkan jumlah pemilihnya, atau jika seorang eksekutif ingin mengimplementasikan sebuah

proyek. Dalam hal ini, kampanye dapat berhasil hanya jika ada lebih banyak orang yang memiliki pandangan positif terhadap partai.

Yang termasuk strategi ofensif adalah “strategi memperluas pasar” dan “strategi menembus pasar”.

a. Strategi perluasan pasar

I. Dalam kampanye pemilu

Strategi perluasan pasar secara ofensif dalam sebuah pemilu bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru di samping para pemilih tradisional (tetap) yang telah ada. Strategi ini perlu disiapkan melalui sebuah kampanye pengantar, untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran baru apa saja dan penawaran mana saja yang lebih baik, dibanding dengan penawaran partai-partai lainnya.

Bagi partai sendiri, persyaratan berikut harus dipenuhi dan konsekuensinya harus dipertimbangkan:

- i. Platform partai harus disertakan dan melengkapi program yang baru
- ii. Bersamaan dengan ditampilkannya program baru, profil partai juga akan berubah. Karena itu, profil yang baru harus tetap dapat diterima oleh pemilih lama, sehingga bertambahnya jumlah pemilih baru tidak diiringi oleh hilangnya lama, atau jumlah pemilih

- iii. Orang-orang tertentu harus selaras dengan program tertentu. Orang-orang tersebut harus menampilkan keselarasan program dan individu.
- iv. Program atau isu baru tidak dapat dimunculkan secara tiba-tiba. Sebelumnya para pemegang jabatan atau wakil rakyat yang terpilih harus sudah dipersiapkan melalui program pengembangan SDM.

## II. Dalam penerapan kebijakan

Dalam kasus ini, produk baru yang ditawarkan, yakni kebijakan baru atau lebih tepatnya keuntungan yang dihasilkan oleh kebijakan baru tersebut perlu dipropagandakan. Untuk itu pertama-tama kebijakan tersebut harus dirumuskan secara jelas. Kebijakan yang belum rampung sama tidak menariknya dengan produk yang belum rampung.

### b. Strategi menembus pasar

Strategi menembus pasar bukan menyangkut ditariknya pemilih lawan atau warga yang selama ini tidak aktif dengan memberikan penawaran yang lebih baik atau baru, melainkan penggalan potensi yang sudah ada secara lebih optimal, atau penggalan bagian yang dimiliki kelompok target dimana keberhasilan telah diperoleh sebelumnya.

## 2) Strategi Defensif

Strategi defensif akan muncul ke permukaan jika partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya atau jika pangsa pasar ingin dipertahankan.

### I. Strategi mempertahankan pasar

Strategi ini merupakan tipikal strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan mayoritasnya. Partai pemerintahan merawat pemilih tetap mereka dan berusaha memperkuat pemahaman para pemilih musiman yang sebelumnya memilih mereka. Partai yang ingin mempertahankan pasar akan mengambil sikap yang bertentangan dari partai-partai yang menerapkan strategi ofensif. Bila partai-partai lain berusaha menonjolkan perbedaan untuk dapat memberikan tawaran yang lebih menarik, sebaliknya partai-partai yang menerapkan strategi defensif justru berupaya agar perbedaan yang ada tidak dikenali.

### II. Strategi melepas atau menyerahkan pasar

Strategi melepas pasar dapat memiliki dua arti. *Pertama*, sebuah partai ingin menyerah dan dalam keadaan tertentu ingin melebur dengan partai lain. *Kedua*, dalam pemilu yang menggunakan kertas suara (balot), dimana ada pemungutan suara putaran kedua yang hanya diikuti oleh

kandidat terkuat dalam pemilu tahap pertama, penyerahan pasar sementara waktu kepada pihak ketiga adalah sebuah langkah yang sangat sering terjadi.

### **3) Campuran Strategi antara Defensif dan Ofensif**

Sebuah strategi campuran dapat terjadi, jika salah satu partai dalam koalisi pemerintahan menerapkan strategi defensif terhadap partai oposisi, dan pada saat yang sama, di dalam koalisi ia melakukan strategi ofensif terhadap mitra koalisinya. Meskipun secara strategis keputusan ini selalu beresiko, tetapi adakalanya cara ini membawa keberhasilan yang signifikan. Ada beberapa syarat penting untuk penerapan strategi kombinasi seperti ini, yakni bahwa strategi harus diarahkan secara tepat pada satu partai dalam waktu tertentu tanpa ambisi apa pun, terlepas dari apakah yang diambil sikap ofensif atau defensif.<sup>26</sup>

### **B. Konsep Lingkungan Strategis**

Untuk mengetahui pengaruh kunci serta pemilihan strategi oleh suatu institusi atau organisasi (partai) yang sesuai dengan beberapa tantangan-tantangan di depannya, maka digunakanlah konsep lingkungan strategis. Penjelasan lingkungan menurut Wahyudi, adalah salah satu faktor penting untuk menunjang keberhasilan organisasi dalam persaingan. Wahyudi membagi lingkungan menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pembagian ini

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, 121



didasarkan atas kontrol/pengaruh organisasi terhadap lingkungan-lingkungan tersebut.<sup>27</sup>

Sedangkan untuk isu strategis, menurut Bryson, isu strategis digunakan sebagai pilihan kebijakan mendasar yang mempengaruhi mandat, misi, nilai, tingkat dan kombinasi pelayanan klien, biaya organisasi atau manajemen. Isu strategis dapat muncul karena berbagai alasan dan perubahan lingkungan organisasi, sehingga perubahan lingkungan internal maupun eksternal menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.<sup>28</sup>

Perubahan/perkembangan lingkungan strategis dalam dimensi politik, mempunyai implikasi pada output kebijakan dan arah orientasi institusi politik. Hal ini akan membawa implikasi, baik positif maupun negatif sekaligus secara bersamaan. Implikasi positif akan membawa manfaat dalam mendukung cita-cita, tujuan dan kepentingan politik, sedangkan implikasi negatif menyebabkan peningkatan potensi ancaman bagi keberlangsungan politik. Oleh karenanya, perkembangan lingkungan strategis, perlu dicermati oleh para analis, perancang, pembuat dan pengambil keputusan politik dalam rangka untuk mencapai *survival of the fittest*.<sup>29</sup>

Ikrar menambahkan, dalam perkembangan lingkungan strategis, bisa dibagi ke dalam level global, maupun level nasional. Dinamika lingkungan

---

<sup>27</sup>Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 258

<sup>28</sup>*Ibid.*, 260

<sup>29</sup>Ikrar Nusa Bhakti, "Geopolitik, Lingkungan Strategis Asia Pasifik, dan Arah Kebijakan Pertahanan Indonesia di Masa Mendatang", dalam Sri Yanuarti, *Kaji Ulang Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI (P2P-LIPI), 2004), 13

strategis ini berbanding lurus dengan tingkat perubahan politik. Meskipun obyek yang digunakan Ikrar ini adalah penekanannya di bidang pertahanan, tapi peneliti menganalogikan kerangka konsep yang dibangun oleh Ikrar ini bisa diterapkan kedalam obyek kajian manapun, termasuk dalam memotret pergeseran strategi partai politik.

Untuk selanjutnya, penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisa secara singkat lingkungan strategis yang mempengaruhi pergeseran strategi partai politik di Indonesia, khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Karena itu, ada beberapa hal penting yang dikemukakan oleh peneliti dan akan diuraikan dalam tiga bagian. Bagian *pertama* akan membahas perkembangan dan kecenderungan pada tingkat global. Bagian *kedua* menggambarkan dan menganalisa perkembangan lingkungan strategis di tingkat nasional Indonesia. Bagian *ketiga* menggambarkan implikasi perkembangan lingkungan strategis tersebut terhadap pergeseran ideologi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

### **C. Konsep Tipologi Partai**

Dalam sebuah partai, terdapat banyak definisi dan tipologi tentang partai politik dan sistem kepartaian. Peneliti akan mengklasifikasikan beberapa tipologi partai politik menurut dimensi dan strateginya dalam menghadapi masalah.

*Pertama, partai berbasis elite (the elite party)*, adalah yang struktur organisasinya didasarkan pada eksistensi elite tersebut sebuah wilayah spesifik. Perbedaan otoritas daripada partai-partai elite ini dibagi menjadi dua jenis partai.

Sedangkan struktur partai tingkat nasional didasarkan pada aliansi elite-elite lokal.<sup>30</sup>

*Kedua, partai berbasis massa (the mass party)* yakni partai yang memiliki anggota cukup banyak dan berperan aktif di setiap pemilu. Dalam usaha menyebarkan ideologi partai dan menentukan basis keanggotaan. Partai ini mencari jalan untuk menembus sejumlah ruang kehidupan sosial. Partai ini selain melakukan mobilisasi jaringan organisasi dengan program obyektif partai di saat pemilu legislatif yang bervariasi di wilayah kehidupan sosial.

Partai yang berbasis massa ini dibagi menjadi empat jenis partai. *Pertama*, partai leninisme adalah partai yang berbasis ideologi kelas dan proto-hegemonic. Partai ini memiliki keinginan untuk menggulingkan sistem politik dan merubah masyarakat melalui revolusi. Anggota partai ini diseleksi secara ketat, harus memiliki loyalitas, kepatuhan tinggi kepada partai juga partai menggunakan struktur tertutup. *Kedua*, partai nasionalis pluralis adalah partai yang basis massanya cukup banyak, termasuk organisasi yang berada di luar partai dan kolaborasi dengan kelompok-kelompok organisasi kultural dan persekutuan perdagangan. *Ketiga*, partai ultranasionalis adalah partai yang secara tersendiri diorganisasi oleh seorang pemimpin yang karismatik dan seorang yang ideologis yang mengagung-agungkan bangsa dan ras individunya, membenci kaum minoritas, dan secara terbuka mengagumi penggunaan kekuatan militer. *Keempat*,

---

<sup>30</sup>Larry Diamond and Richard Gunther, *Political Parties and Democracy*, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001), 12

partai religius fundamentalis adalah partai yang memiliki doktrin prinsip-prinsip agama dalam pelibatan massa di setiap agendanya.<sup>31</sup>

*Ketiga, partai yang berbasis etnik* adalah partai yang didasarkan atas tipikal etnik. Partai ini memiliki tujuan dan strategi yang terbatas, yakni menyuarakan kepentingan sebagian kelompok atau kepentingan kelompok koalisi.

*Keempat, partai yang mengambil semua (the catch all party)* yakni partai yang membidik seluruh segmen masyarakat sebagai implikasi dari mudarnya dominasi kelas menyusul keberhasilan partai-partai massa memperjuangkan hak pilih bagi seluruh warga dan terwujudnya kesejahteraan, sehingga partai-partai dari kelas dominan dan partai massa sebagai partai dari sub-kultur yang terpinggirkan, kehilangan dasar keberadaan mereka. dalam *the catch all party* terdapat konflik dalam hubungan di antara ketiga unsur partai terkait dengan persoalan apakah kantor pusat agen dari partai di institusi publik untuk mengorganisasikan dan mengarahkan dukungan dari bawah.

*Kelima, partai kartel (the cartel party)* adalah partai yang didominasi oleh partai di institusi publik yang semakin otonom dari kantor pusat dan bawah, partisipasinya tinggi dalam pemerintahan, banyak berkolaborasi dengan negara, bahkan terserap ke dalamnya (antara lain melalui ketergantungan yang tinggi terhadap subsidi), di mana para anggota partai di institusi publik melihat politik sebagai karir. Ciri-ciri partai kartel menurut Wolinetz adalah pemilih yang terdifusi, melakukan kegiatan-kegiatan kampanye yang berbiaya tinggi,

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, 18-22

menekankan pada ketrampilan manajerial dan efisiensi, diorganisasikan secara longgar, dan berjarak terhadap para anggotanya sehingga nyaris tak berbeda dari non-anggota. Menurutnya pula, partai kartel merupakan broker antara masyarakat sipil dan negara, bahkan agen dalam negara dalam berhadapan dengan masyarakat sipil.<sup>32</sup>

Adapula sejumlah tipologi partai politik menurut kriteria:<sup>33</sup>

#### 1) Asas dan Orientasi

Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik diklasifikasikan menjadi tiga tipe, yaitu partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan. Partai politik pragmatis adalah partai politik yang memiliki program dan kegiatan yang tidak terikat pada suatu doktrin atau ideologi tertentu. Yang dimaksud dengan partai politik doktriner ialah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan yang kongkret sebagai wujud dan penjabaran ideologinya. Selanjutnya, partai politik kepentingan merupakan partai politik yang dibentuk dan dikelola berdasarkan kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

#### 2) Komposisi dan Fungsi Anggota

Menurut komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik digolongkan menjadi dua, yaitu partai massa dan partai kader. Yang dimaksud dengan partai

---

<sup>32</sup>Arief Munandar, *Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Kedailan Sejahtera (PKS) dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*, (Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), 14-15

<sup>33</sup>Ramlan Surbakti, *Op.cit*, 121

massa adalah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dan mengandalkan massa sebanyak-banyaknya. Sedangkan partai kader ialah partai politik yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama partai.

### 3) Basis Sosial dan Tujuan

Gabriel Almond menggolongkan partai politik menjadi empat tipe, yaitu:<sup>34</sup>

- I. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah dan bawah.
- II. Partai politik yang keanggotaannya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh dan pengusaha.
- III. Partai politik yang keanggotaannya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, katolik, Protestan, Hindu dan Budha.
- IV. Partai politik yang keanggotaannya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan dari daerah tertentu.

#### a. Orientasi Partai

Berdasarkan orientasi partai, dikemukakan oleh Wolinetz, yaitu, partai pejuang kebijakan (*the policy seeking party*), partai pengejar suara (*vote seeking party*), dan partai pengejar jabatan publik (*the office seeking party*). Dari kategori tersebut menggambarkan perilaku dan kecenderungan faksi-faksi yang ada di dalam partai, di samping struktur dan organisasi partai.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, 123

*The policy seeking party* adalah partai yang berorientasi pada isu dan memprioritaskan orientasi kebijakannya dibandingkan merebut suara pemilih atau menduduki jabatan-jabatan publik. Dengan demikian terdapat sejumlah anggota yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap sebagian atau seluruh tujuan partai.

*The vote seeking party* adalah partai yang berorientasi pada kemenangan pemilu, sehingga hal-hal lain termasuk kebijakan dan jabatan publik yang dikejar disesuaikan dengan tujuan tersebut. Orientasi partai disusun minimalis, terdiri dari profesional partai, kandidat, dan calon kandidat yang dapat dibantu oleh sejumlah relawan sesuai dengan kebutuhan.

*The office seeking party* partai yang berorientasi menduduki jabatan-jabatan publik, baik dengan kekuatan sendiri maupun berkoalisi dengan kekuatan politik lain, baik dengan tujuan mempertahankan diri, menyeimbangkan sistem politik yang bekerja, atau memperoleh akses terhadap patron. Dengan demikian partai jenis ini tidak akan berkomitmen terhadap kebijakan atau strategi yang akan membuat kekuatan-kekuatan politik lain enggan berkoalisi dengannya. Partai jenis ini tidak cocok bagi para kader ideologis, dan lebih mampu mempertahankan para pemburu jabatan.<sup>35</sup>

#### b. Kader

Kader adalah orang atau pihak yang mengabdikan dirinya untuk tujuan perjuangan. Seorang kader bukan hanya sekedar orang-orang yang menjadi anggota organisasi, meski memang seorang kader harus melalui tahap-tahap

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, 17-19

khusus, dimana menjadi anggota merupakan salah satu tahap untuk menjadi seorang kader dalam suatu organisasi. Kader merupakan tumpuan masa depan sebuah organisasi, karena seorang kader yang tangguh mereka yang pada suatu ketika bisa bangkit dari kekalahan dan kehancuran. Seorang kader bukan sekedar orang yang punya keahlian tinggi tetapi juga telah menyediakan hidupnya bagi kebutuhan perjuangan.

Wolinetz menggunakan dua variabel, jumlah anggota dan tingkat keterlibatan anggota dalam aktifasi partai, untuk menyusun kategori baru, yaitu: partai kader klasik (*classic cadre party*), partai kader modern (*modern cadre party*), partai tokoh (*leader centered party*), partai massa (*mass party*).

Kaderisasi sendiri merupakan proses yang dilakukan oleh satuan tugas khusus, yang bekerja memungkinkan lahirnya suatu organisasi. Aktifitas prosesnya tidak hanya dalam pendidikan formal dalam kelas, tetapi lebih sistematis yang menyatukan pikiran dan tindakan. Seorang kader memiliki tugas antara lain: *partama*, merumuskan dengan tegas melalui penyelidikan akurat siaoa yang mendukung perubahan dan yang menolak perubahan. *Kedua*, tanpa ragu turun ke rakyat dan melakukan integrasi sepenuhnya tinggal bersama rakyat. *Ketiga*, tangkas dalam merumuskan penderitaan rakyat dalam tuntutan politik. dan keempat, menjaga sikap di tengah rakyat (sifat-sifat dasar) di bawah prinsip memenangkan hati rakyat untuk kemudian memenangkan pikiran.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Timur Mahardika, *Gerakan Massa (Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan Secara Damai)*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2000), 248-249